

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Semarang

Halaman 4

WTP Bukan Berarti Tak Ada Temuan

UNGARAN - Bupati Mundjirin mengakui dalam Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2017 masih ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena opini WTP yang diberikan oleh BPK kepada Pemkab Semarang bukan berarti tidak ada temuan dalam pengelolaan keuangan daerah.

"WTP tidak bisa dikatakan tak ada temuan. Meskipun ada temuan, WTP masih bisa. Namun temuan itu diharapkan terus berkurang," kata Mundjirin, Senin (30/7).

Menurut Mundjirin, pernah ada temuan BPK yang susah sekali diatasi. Menurutnya, dahulu pernah ada bantuan bergulir berupa sapi tetapi sapi sudah tidak ada dan masih ada utang. "Hal-hal seperti itu harus disikapi, *kan ndak* mungkin masyarakat suruh *nyaur* utang, gimana sapi sudah tidak ada. Akhirnya kita lemparkan pada piutang negara," ungkapnya.

Mundjirin mengungkapkan, ada beberapa permasalahan sehingga menjadi temuan, di antaranya bendahara yang dobel. Ada satu OPD (organisasi perangkat daerah) yang terpaksa harus dobel mengurus bendahara penerimaan dan pengeluaran dijadikan satu. "Itu pasti temuan. Kadang-kadang orang mengatakan (meraih WTP) tidak boleh ada temuan, memang seharusnya begitu," tandasnya.

Seingat Mundjirin, tidak ada kabupaten/kota di Indonesia yang nol temuan atau sama sekali tak ada temuan BPK. "Bahkan di kementerian dan lembaga pun masih ada temuan-temuan. Jadi jangan sampai (mengatakan) tidak ada temuan berarti baru mendapat WTP," ujarnya.

■ Berkurang

Mundjirin berharap ke depan temuan dari BPK semakin berkurang. Pemkab Semarang terus berupaya mengurangi adanya temuan BPK dalam pengelolaan keuangan daerah. "Kita sudah

mengurangi temuan BPK, temuan itu harus segera kita hilangkan. Sebelumnya pernah sampai ada 18 temuan," bebarnya.

Mundjirin meminta OPD agar tidak melanggar kepatuhan terhadap Undang-undang. Pihaknya akan mengingatkan pimpinan OPD untuk mematuhi ketentuan. "Jadi, yang diberitahukan oleh BPK harus segera dilaksanakan ya kita peringatkan. Kepatuhan jangan sampai dilanggar," tegasnya.

Kata Mundjirin, kabupaten/kota yang mendapat opini WTP dari BPK tidak menjamin bebas atau terhindar dari korupsi. "Walapun WTP, bisa sewaktu-waktu anda tertangkap kalau tidak sesuai aturan," tandasnya.

Seperti diberitakan, Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Semarang, M Jauhari mengatakan, BPK menemukan standar penilaian internal yang belum memadai dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2017. Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017.

"Ada empat kriteria penilaian, yakni standar akuntansi pemerintah, standar penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi dan kepatuhan terhadap undang-undang. Ternyata dua kriteria menjadi temuan BPK, yaitu 9 temuan standar penilaian internal (SPI) dan delapan kepatuhan terhadap undang-undang," ungkap Jauhari, Selasa (24/7) lalu. ■

rbd/SR